

EFEKTIVITAS PEMENUHAN KLASER PERLINDUNGAN KHUSUS MELALUI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA SALATIGA

Michael Jeremiah Gultom 1*, Dewi Rostyaningsih 2*

**Program Studi S1 Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**
Jalan Prof. Soedarto, S. H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405
Laman: www.fisip.undip.ac.id Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Child violence in the City of Salatiga shows a concerning increase, with the most significant threat occurring within the household environment. This indicates a discrepancy with Municipal Regulation No. 47 of 2018. This research aims to analyze the effectiveness of fulfilling special protection clusters through Child-Friendly City (KLA) policies in Salatiga City and identify factors hindering its effectiveness. The research methodology employs Policy Effectiveness Theory according to Riant Nugroho. Research findings reveal that while some aspects align with effectiveness indicators, several other aspects still show non-compliance. Inhibiting factors include human resources and bureaucratic structures. Recommendations encompass transforming PT2P2A into a Technical Implementation Unit (UPTD), prioritizing case management systems, optimizing information technology, providing child case handling training for teachers, and utilizing digital platforms.

Keywords: *Special protection clusters, Child-Friendly City, effectiveness.*

ABSTRAK

Kekerasan terhadap anak di Kota Salatiga menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan, dengan ancaman terbesar terjadi di lingkungan rumah tangga. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan Perwali No. 47 Tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemenuhan klaster perlindungan khusus melalui kebijakan KLA di Kota Salatiga dan mengidentifikasi faktor penghambat efektivitasnya. Metode penelitian menggunakan teori Efektivitas Kebijakan menurut Riant Nugroho. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun beberapa aspek telah sesuai dengan indikator efektivitas, masih terdapat ketidaksesuaian pada beberapa aspek lainnya. Faktor penghambat adalah sumber daya dan struktur birokrasi. Rekomendasi mencakup transformasi PT2P2A menjadi UPTD, mengedepankan sistem manajemen kasus, optimalisasi teknologi informasi, pelatihan penanganan kasus anak bagi guru, dan penggunaan platform digital.

Kata Kunci: Klaster perlindungan khusus, Kota Layak Anak, efektivitas.

PENDAHULUAN

Kesejahteraan sosial menjadi indikator penting dalam pembangunan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan hak-hak anak yang harus dijamin sejak dini. Anak-anak merupakan aset bangsa yang harus mendapatkan perlindungan optimal agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Kota Salatiga telah menerapkan kebijakan Kota Layak Anak (KLA) sesuai dengan Perwali No. 47 Tahun 2018, yang mencakup berbagai aspek pemenuhan hak anak, salah satunya adalah klaster perlindungan khusus. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam upaya menekan angka kekerasan terhadap anak. Berdasarkan data DP3APPKB Kota Salatiga, kasus kekerasan anak terus meningkat, dari 17 kasus pada tahun 2021 menjadi 22 kasus pada tahun 2022, dan melonjak menjadi 32 kasus pada tahun 2023. Data ini juga

menunjukkan bahwa lingkungan rumah tangga menjadi tempat dengan jumlah kasus kekerasan tertinggi setiap tahunnya, dengan 20 kasus pada tahun 2023, jauh lebih tinggi dibandingkan di sekolah (6 kasus) dan fasilitas umum (5 kasus).

Selain itu, data demografi menunjukkan bahwa lebih dari 56 ribu penduduk Kota Salatiga berusia 0-19 tahun, yang berarti kelompok usia ini memiliki risiko tinggi mengalami pelanggaran hak jika tidak ada perlindungan yang efektif.

Kota Salatiga sendiri telah meraih penghargaan KLA kategori Madya sejak 2019 hingga 2023, tetapi stagnasi ini menunjukkan bahwa masih ada aspek dalam pemenuhan hak anak yang perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan KLA dalam pemenuhan klaster perlindungan khusus, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang

menghambat keberhasilannya, guna memberikan rekomendasi perbaikan dalam implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Salatiga.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diidentifikasi rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas program Kota Layak Anak dalam pemenuhan klaster perlindungan khusus di Kota Salatiga?
2. Apa faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi program Kota Layak Anak dalam pemenuhan klaster perlindungan khusus di Kota Salatiga?

KAJIAN TEORI

Administrasi Publik

Administrasi publik didefinisikan sebagai proses pengorganisasian dan koordinasi sumber daya publik guna memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola kebijakan publik (Chandler & Plano dalam Pasolong, 2010:7). Nicholas Henry (dalam Pasolong, 2011) menyebut administrasi publik sebagai teori dan praktik yang bertujuan untuk memperkenalkan masyarakat kepada pemerintahan serta meningkatkan responsivitas kebijakan publik terhadap kebutuhan sosial.

Terdapat lima paradigma dalam administrasi publik menurut Nicholas Henry (1995):

1. Dikotomi Politik-Administrasi (1900-1926) – Memisahkan urusan politik dari administrasi.
2. Prinsip-Prinsip Administrasi (1927-1937) – Fokus pada prinsip-prinsip administrasi sebagai ilmu universal.
3. Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik (1950-1970) – Menganggap administrasi sebagai bagian dari ilmu politik.
4. Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi Publik (1956-1970) – Berfokus pada teori organisasi dan teknik manajemen.
5. Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970-sekarang) – Berorientasi pada teori administrasi, manajemen modern, dan politik-ekonomi.

Paradigma New Public Management (NPM) menekankan efisiensi, privatisasi, dan fleksibilitas dalam administrasi publik, sementara New Public Service (NPS) mengutamakan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelayanan publik.

Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah keputusan pemerintah dalam menangani isu publik. Dye (1992:2) mendefinisikan kebijakan

publik sebagai "apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan". Friedrich dalam Wahab (1991:13) mendeskripsikan kebijakan sebagai tindakan yang bertujuan mencapai sasaran tertentu dengan menghadapi hambatan.

Menurut Riant Nugroho (2018), efektivitas kebijakan publik dapat diukur melalui lima indikator:

1. Tepat kebijakan – Sejauh mana kebijakan mampu menyelesaikan masalah.
2. Tepat pelaksanaan – Efektivitas implementasi kebijakan oleh pemerintah dan pihak terkait.
3. Tepat target – Kesesuaian kebijakan dengan kelompok sasaran.
4. Tepat lingkungan – Interaksi antara kebijakan dan konteks sosial.
5. Tepat proses – Efektivitas dalam setiap tahap kebijakan.

Efektivitas Kebijakan Publik

Efektivitas kebijakan mengukur sejauh mana kebijakan mencapai tujuan yang diharapkan (Agung Kuniawan, 2005). Dunn (2006:437) menyatakan bahwa responsivitas masyarakat menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan suatu kebijakan.

Dalam konteks Kota Layak Anak (KLA), kebijakan perlindungan anak harus memenuhi standar Permen PPPA No. 12

Tahun 2011, seperti peningkatan layanan anak berhadapan dengan hukum (ABH), keadilan restoratif, dan mekanisme perlindungan anak berbasis komunitas.

Kebijakan Kota Layak Anak (KLA)

KLA merupakan sistem pembangunan berbasis hak anak yang mengintegrasikan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Perpres No. 25 Tahun 2021 menjadi dasar kebijakan ini, dengan tujuan memastikan pemenuhan hak anak dan perlindungan mereka di tingkat daerah.

KLA mengklasifikasikan hak anak ke dalam enam kategori:

1. Hak sipil dan kebebasan
2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
3. Kesehatan dasar dan kesejahteraan
4. Pendidikan dan aktivitas budaya
5. Perlindungan khusus
6. Penguatan kelembagaan

METODE PENELITIAN

Tata kerja penelitian ditulis secara jelas, sehingga percobaan atau penelitian tersebut dapat diulang dengan hasil yang sama. Berisi rancangan desain/prosedur penelitian, populasi dan sampel /sumber data, Teknik pengumpulan data dan pengembangan instrument, teknik analisis data. Pemaparan dilakukan secara naratif

dalam bentuk alinea yang terpadu. (10pt, 1 spasi, 1 paragraf).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan fenomena secara mendalam berdasarkan data lapangan. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis efektivitas pemenuhan klaster perlindungan khusus melalui kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Salatiga. Kota Salatiga dipilih sebagai lokasi penelitian karena telah menerapkan kebijakan KLA namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya.

Subjek penelitian mencakup berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan KLA, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Salatiga, Dinas Pendidikan Kota Salatiga, Forum Anak Kota Salatiga, serta SMP Negeri 8 Salatiga sebagai representasi sekolah yang turut berpartisipasi dalam program KLA.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta interaksi dengan informan kunci. Sementara itu,

data sekunder berupa dokumen kebijakan, laporan resmi, jurnal, serta sumber dari internet yang berkaitan dengan kebijakan KLA dan perlindungan anak.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap informan kunci untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan KLA dan kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Observasi dilakukan secara partisipatif dengan mengamati langsung efektivitas program di lapangan. Selain itu, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan laporan resmi, kebijakan pemerintah, foto dokumentasi, serta data sekunder lainnya yang mendukung analisis.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang relevan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengidentifikasi pola utama.

Selanjutnya, data yang telah dipilih disusun dalam bentuk tabel, matriks, atau narasi untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, di mana data yang telah dianalisis secara mendalam digunakan untuk mengungkap temuan

utama yang mendukung atau menentang teori yang digunakan dalam penelitian.

Untuk memastikan keakuratan dan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yang terdiri dari triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan guna memastikan kesesuaian data.

Triangulasi teknik diterapkan dengan menggunakan lebih dari satu metode pengumpulan data untuk mengonfirmasi hasil penelitian. Sementara itu, triangulasi waktu digunakan untuk menguji data dalam kondisi dan waktu yang berbeda guna menghindari bias temporal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis efektivitas pemenuhan kluster perlindungan khusus melalui kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Salatiga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam hal ketepatan kebijakan, pelaksanaan, target, lingkungan, dan proses.

1. Ketepatan Kebijakan

Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Salatiga telah didasarkan pada regulasi yang jelas,

seperti Perwali No. 47 Tahun 2018. Namun, masih terdapat beberapa ketidaksesuaian antara kebijakan yang telah ditetapkan dan implementasinya di lapangan. Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya integrasi lintas sektor dalam upaya perlindungan anak. Meskipun berbagai instansi terkait telah berupaya menjalankan program KLA, koordinasi antarinstansi masih lemah, menyebabkan efektivitas kebijakan menjadi terbatas.

2. Ketepatan Pelaksanaan

Dalam aspek pelaksanaan, penelitian menemukan bahwa sumber daya manusia menjadi salah satu kendala utama dalam pemenuhan kluster perlindungan khusus. Kota Salatiga mengalami kekurangan tenaga profesional, terutama psikolog dan pengacara anak yang bertugas dalam penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Hingga saat ini, tenaga psikolog yang tersedia masih bermitra secara eksternal, sementara pengacara khusus anak belum tersedia. Hal ini berdampak pada keterlambatan dalam pendampingan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan atau pelanggaran hukum.

Selain itu, dari hasil observasi dan wawancara dengan DP3APPKB Kota Salatiga, diketahui bahwa alokasi anggaran untuk program KLA masih terbatas, sehingga menyebabkan keterbatasan fasilitas ramah anak di berbagai tempat. Contohnya, ruang aman anak yang tersedia di puskesmas dan kantor kelurahan masih kurang memadai dalam jumlah dan kualitas.

3. Ketepatan Target

Target utama dari kebijakan KLA adalah memastikan anak-anak mendapatkan perlindungan yang layak, terutama bagi mereka yang berada dalam kondisi rentan. Namun, data menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak di Kota Salatiga mengalami peningkatan setiap tahunnya, dari 17 kasus pada 2021 menjadi 32 kasus pada 2023. Mayoritas kasus terjadi di lingkungan rumah tangga, yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak.

Program Satuan Tugas Perlindungan Anak yang bertujuan untuk menanggulangi kekerasan anak belum berjalan optimal karena keterbatasan sumber daya manusia dan minimnya sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini menyebabkan banyak kasus kekerasan

anak tidak dilaporkan atau ditangani secara efektif.

4. Ketepatan Lingkungan

Lingkungan yang mendukung kebijakan KLA sangat penting dalam memastikan keberhasilannya. Berdasarkan wawancara dengan Dinas Pendidikan Kota Salatiga, ditemukan bahwa pemanfaatan fasilitas yang telah dibangun, seperti pojok baca dan taman bermain anak, masih kurang optimal karena rendahnya kesadaran masyarakat. Beberapa fasilitas yang telah tersedia tidak digunakan secara maksimal oleh masyarakat akibat kurangnya promosi dan sosialisasi.

Selain itu, Forum Anak Kota Salatiga mengungkapkan bahwa fasilitas umum seperti taman kota belum sepenuhnya ramah anak. Banyak taman bermain yang tidak terawat, sehingga tidak memberikan kenyamanan bagi anak-anak.

5. Ketepatan Proses

Dalam aspek proses, penelitian menemukan bahwa kurangnya koordinasi antarinstansi masih menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan KLA. Meskipun Kota Salatiga telah menggunakan sistem SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak)

untuk pencatatan kasus kekerasan terhadap anak, sinkronisasi data antara DP3APPKB dengan dinas lain belum optimal. Akibatnya, jumlah kasus yang tercatat di masing-masing instansi sering kali tidak sinkron, menyebabkan ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan kebijakan.

Upaya sosialisasi terkait kebijakan KLA juga belum dilakukan secara menyeluruh. Banyak masyarakat yang masih belum memahami pentingnya peran mereka dalam mendukung kebijakan perlindungan anak. Forum Anak sebagai wadah partisipasi anak juga belum diberdayakan secara maksimal untuk menyuarakan aspirasi dan kebutuhan anak-anak di Kota Salatiga

Faktor utama yang menghambat efektivitas kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Salatiga terdiri dari keterbatasan sumber daya dan struktur birokrasi yang belum optimal. Dari segi sumber daya, salah satu kendala terbesar adalah kurangnya tenaga profesional, terutama dalam bidang pendampingan hukum dan psikologis bagi anak. Saat ini, Kota Salatiga belum memiliki pengacara khusus anak, sementara tenaga psikolog yang tersedia masih bermitra secara eksternal. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi hambatan signifikan, menyebabkan minimnya fasilitas ramah

anak di berbagai tempat, seperti ruang aman anak di puskesmas dan kantor kelurahan yang masih kurang memadai.

Sementara itu, dalam aspek struktur birokrasi, koordinasi antarinstansi yang bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan KLA masih belum optimal. Salah satu permasalahan yang muncul adalah sinkronisasi data kasus kekerasan anak antara DP3APPKB dan dinas lainnya, yang sering kali tidak konsisten. Perbedaan pencatatan ini berdampak pada kurangnya akurasi dalam perumusan kebijakan dan alokasi sumber daya yang tepat. Selain itu, mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi program KLA masih lemah, menyebabkan banyak program yang berjalan tanpa monitoring yang efektif.

KESIMPULAN

Efektivitas pemenuhan klaster perlindungan khusus dalam kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Salatiga telah memenuhi beberapa indikator, namun masih menghadapi kendala dalam implementasinya. Tepat kebijakan sudah memiliki SOP respons cepat, tetapi masih lemah dalam struktur. Tepat pelaksanaan menunjukkan koordinasi antarinstansi yang baik, namun terkendala keterbatasan tenaga profesional dan sistem yang belum terintegrasi. Tepat target telah mencapai 100% layanan bagi anak, tetapi sistemnya

masih perlu penyempurnaan. Tepat lingkungan menghadapi tantangan minimnya keterlibatan masyarakat dan kurangnya platform pengaduan. Tepat proses mengalami kemajuan dalam pelatihan dan anggaran, tetapi infrastruktur ramah anak masih perlu dikembangkan.

SARAN

Untuk meningkatkan efektivitas pemenuhan klaster perlindungan khusus dalam kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Salatiga, perlu dilakukan perbaikan di beberapa aspek. DP3APPKB disarankan untuk mentransformasi P2TP2A menjadi UPTD, mengembangkan sistem manajemen kasus berbasis data, serta mengoptimalkan teknologi informasi dalam pemantauan kasus. Selain itu, perlu memperluas jaringan mitra, terutama dengan membentuk LSM yang fokus pada perlindungan anak. Dinas Pendidikan perlu melatih guru dalam penanganan kasus kekerasan anak, menciptakan mekanisme pelaporan yang cepat, dan memanfaatkan platform digital untuk komunikasi yang lebih efektif.

Tenaga pendidik juga perlu berkolaborasi dengan psikolog dalam membentuk tim penanganan kasus serta diberikan pelatihan untuk mengenali tanda-tanda kekerasan dan trauma pada anak. Selain itu, keterlibatan masyarakat

harus diperkuat melalui kampanye kreatif di media sosial dan penyebaran informasi dengan melibatkan tokoh masyarakat dan influencer lokal agar lebih luas jangkauannya. Terakhir, diperlukan inovasi aplikasi pelaporan anonim, yang memungkinkan anak-anak melaporkan masalah mereka secara aman tanpa takut akan tekanan atau intimidasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Riant Nugroho Dwijowijoto. (2021). Kebijakan Publik: Analisis Kebijakan Publik. ALEX MEDIA KUMPUTINDO.
- Abdurssamad, Z. (2021). Buku-Metode-Penelitian-Kualitatif.
- Anis Irawani, Usman Jaelan, & Arfah Rahmawati Sitti. (2021). EFEKTIVITAS PROGRAM PELAYANAN KOLABORASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GOWA. Jouenal Unismuh, 2, 1104–1116.
- Budiarto Rahayu. (2020). EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) OLEH BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU (KCP) MAKASSAR

- TAMALANRE. In Universitas Hasanuddin.
- Dimas Mahendra, F., Ambarwati, A., & Raharja, W. T. (2022). EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBAGIAN LIMA RIBU MASKER DESA PESANGGRAHAN KOTA BATU. *Jurnal Intelektual Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi*, 9(1), 10–16.
- Fauziah, E. I., Aris, Haryanto, T., & Suranto; Joko. (2024a). EFEKTIVITAS PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA SURAKARTA UNTUK MEWUJUDKAN KOTA LAYAK ANAK (KLA) Oleh. *JIAP*, 13, 31–46.
- Giri, G., Pratama, S., Aryanto, S. M., Tiurhana, F., Jet, H., Anggriani, S., Sulu, D., & Purnomo, D. (2021). Pendampingan Pembentukan Kelurahan Kauman Kidul Sebagai Kelurahan Layak Anak di Kota Salatiga Tahun 2021 A B S T R A K. *Jurnal Penngabdian Masyarakat*, 2.
- Gonibala, G. P., Waani, J., & Rompas, L. (2021). EVALUASI PELAKSANAAN KOTA LAYAK ANAK DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR (PRASARANA DAN SARANA) RAMAH ANAK DI KOTA KOTAMOBAGU. *Jurnal Fraktal*, 7(2), 1–9.
- Hartanto, C. A. (2023). EVALUASI POGRAM KABUPATEN LAYAK ANAK DALAM PEMENUHAN KLASER PERLINDUNGAN KHUSUS DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR. *Jurnal Tatapamong*, 5, 177–196. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v5i2.3711>
- Kurniawati Dini, & Marom Aufarul. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK DENGAN PENDEKATAN DESA RAMAH ANAK DI DESA GUNEM KECAMATAN GUNEM KABUPATEN REMBANG. *Journal of Public Policy and Management*, 9(1).
- Mahmud, A., & Suandi. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK (KLA) DI KOTA PALEMBANG. *Jurnal Ilmu Administrasi Universitas Sjakhyakirti*, 2, 36–53. www.republika.co.id
- Nyoman Redana, D., & Nyoman Suprpta, dan I. (2023). IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DI SMA NEGERI 4 SINGARAJA. *Locus Majalah Ilmiah Fisip*, 15, 77–87.
- Pebriyanti, P., Lituhayu, D., & Djumiarti, T. (2024). EFEKTIVITAS PROGRAM PENANGANAN DAN PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK DI

- KABUPATEN WONOGIRI. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(2), 1-15.
- Rahmatilah, N. A., Darto Miradhia, & Runiawati, ; Nunung. (2021). EFEKTIVITAS PROGRAM MAL GRHA TIYASA SEBAGAI MODEL PELAYANAN PUBLIK DI KOTA BOGOR. *JANE) Jurnal Administrasi Negara*, Agustus, 13(1), 2086–1338.
- Rezki, N., Sholeh, M., Muchsin, S., & Anadza, H. (2021). IMPLEMENTASI MODEL RICHARD MATLAND DALAM KEBIJAKAN HOME LEARNING DI KONDISI PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo). *Jurnal Respon Publik*, 15(9), 66–73. <https://probolinggokab.go.id/>
- Sihombing, E. L. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK PADA KLASER PERLINDUNGAN KHUSUS DI KOTA SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT.
- Situmorang Gloria Erysa Meilinda, Yuningsih Yani Neneng, & Darmawan Ivan. (2022). EFEKTIVITAS KEBIJAKAN REFOCUSING DAN REALOKASI ANGGARAN BELANJA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2020 DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19. *Jurnal Administrasi Pemerintahan*, 2, 82–105.
- Syela Maleke Tesalonika, Pangkey Masje, & Tampongangot Deysi. (2022). EFEKTIVITAS PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA (KB) DI DESA TEMBOAN KECAMATAN MAESAAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN. *Jurnal Administrasi Publik JAP*, VIII (2), 105–114.
- Tri Alisa, M., Suryanef, Fatmariza, & Muchtar, H. (2024). IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA LAYAK ANAK DALAM PENCEGAHAN TINDAKAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK. *Jurnal Ideologi Dan Konstitusi*, 4, 128–133.
- Vallen Dwi Puspita, O., & Mulyana, N. (2024). IMPLEMENTASI SISTEM MONITORING DAN EVALUASI (SIMOEV) DALAM PENGUKURAN CAPAIAN PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 21, 104–112.
- Watung Jesika, Rompas Y. Welson, & Tampongangoy Dewysi. (2021). EFEKTIVITAS PELAKSAAN PROGRAM PEMBANGUNAN

INFRASTRUKTUR PERDESAAN DI
DESA KAYUUWI 1 KECAMATAN
KAWANGKOAN BARAT
KABUPATEN MINAHASA. *Journal
Administration Public*, VII, 21–27.

Widyawati, K., Id, W. C., & Laksmitasari,
R. (2015). PENILAIAN RUANG
BERMAIN ANAK DI KOTA DEPOK
SEBAGAI SALAH SATU
INDIKATOR TERCAPAINYA KOTA
LAYAK ANAK. In *Faktor Exacta* (Vol.
8, Issue 3).

UNDANG-UNDANG PERATURAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG
KEBIJAKAN KABUPATEN/ KOTA
LAYAK ANAK DENGAN RAHMAT
TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

PERATURAN MENTERI NEGARA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12
TAHUN 2011 TENTANG
INDIKATOR KABUPATEN/KOTA
LAYAK ANAK.

Pradita Utama. (2024). KPAI Terima 3.883
Aduan Pelanggaran Hak Anak
Sepanjang 2023. *DetikNews*. KPAI
Terima 3.883 Aduan Pelanggaran Hak
Anak Sepanjang 2023 .